

ISBN: 978-602-9461-06-0

# PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Tema:  
**Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan**

IKATAN SARJANA PENDIDIKAN INDONESIA (ISPI)  
*bekerjasama dengan*  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

2012



## **PENGANTAR PROCEEDING**

Seminar Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang mengambil Tema Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan, didasari kondisi objektif berbagai persoalan pendidikan yang semakin hari semakin kompleks dan menuntut pemecahan dan penyelenggaraan yang sistemik.

Beberapa isu pendidikan yang saling berkait dan strategik terutama menyangkut tenaga pendidik, pembiayaan, sarana dan infrastruktur, sistem evaluasi, dan yang tak kalah penting yang acapkali terlupakan adalah proses pendidikan itu sendiri.

Hal terakhir yang disebutkan menyangkut kompetensi tenaga pendidik yang harus dikembangkan secara berlanjutan mulai dari rekrutmen sampai pensiun. Ini terkait dengan bagaimana guru dididik dan dikembangkan profesionalnya.

Semua hal yang disebutkan perlu diorganisasikan ke dalam sistem manajemen nasional pendidikan yang efektif.

Seminar ini diharapkan dapat mengorganisasikan pemikiran secara utuh yang melahirkan alternatif solusi dalam sebuah Re-Desain.

Jakarta, 20 Januari 2012

Ketua Umum PP ISPI

Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd

Proseding

## PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka proseding ini dapat diselesaikan dengan baik. Proseding ini berisi kumpulan makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) tanggal 21-22 Januari 2012 di Yogyakarta..

Seminar nasional ini diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Tema yang diangkat dalam seminar adalah Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan.

Tema pokok tersebut kemudian dijabarkan ke dalam subtema, yaitu (1) Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (2) Redesain Sistem Pendidikan Guru dan Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (3) Redesain Sistem Kurikulum (SKL, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian), (4) Sistem Pendanaan Pendidikan (5) Sarana dan Prasarana Pendidikan, (6) Evaluasi Sistem Pendidikan.

Tema tersebut bertolak dari isu-isu penting yang muncul dalam dunia pendidikan. Renstra Depdiknas, misalnya, mengemukakan tiga hal yang menjadi pilar pendidikan, yaitu (1) Pemerataan dan perluasan akses, (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, (3) Penguatan tata kelola (*governance*), akuntabilitas dan pencitraan publik. Idealnya keseluruhan upaya dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu dilaksanakan dalam konteks NKRI dengan menerapkan konsep desentralisasi pendidikan.

Sementara itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai imperatif yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum, seperti yang menyangkut badan hukum pendidikan, dan gaji guru yang masuk dalam perhitungan 20% biaya pendidikan. Dalam konteks seperti itu muncul pendapat tentang perlunya melakukan redesain terhadap sistem dan desentralisasi pendidikan.

Dalam realitasnya dampak-dampak politis sangat deras merambah dunia pendidikan. Kebijakan dinilai sebagian orang bersifat sporadis, koordinasi kurang efektif, dan terjadi ketakkonsistenan dan ketakkoherenan sistem dan desentralisasi pendidikan. Semua itu berdampak luas terhadap perwujudan sistem pendidikan sebagai bagian integral dari keseluruhan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembicara kunci dalam seminar ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Prof. Dr. Mohammad Nuh. Pembicara-pembicara lain adalah para pakar tingkat nasional bidang pendidikan yang sudah banyak makan garam. Pada umumnya mereka adalah pejabat atau mantan pejabat dalam lembaga kependidikan. Pemikiran dan pengalaman mereka dituangkan dalam bentuk makalah sebagai sumbangsih dalam rangka redesain sistem pendidikan di negara kita.

Akhinrya, panitia menyampaikan terima kasih kepada nara sumber yang telah memberikan kontribusinya berupa pemikiran dan pengalaman dalam bentuk makalah. Semoga pemikiran-pemikiran itu dapat dibaca dan direnungkan untuk kemudian digunakan sebagai acangan untuk membuat desain sistem pendidikan yang lebih baik. Selamat membaca.

## DAFTAR ISI

Halaman

1 KATA PENGANTAR KETUA ISPI

2 PENDAHULUAN

3 DAFTAR ISI

I

Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
*Oleh: Prof. Soedijarto, MA*

Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
*Oleh: Prof. Dr. Fakry Gafar, M.Ed*

Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
*Oleh: Prof. Dr. Agus Dwiyanto*

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 di Sekolah sebagai Sarana Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan. *Oleh: Mulyono, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*

Optimalisasi Desentralisasi Pendidikan (Model *Integrative RegMap-Regulatory Impact Assesment* (IRR) Pembentukan Perda Pendidikan yang Berbasis Pendidikan Berkarakter Kearifan Nilai Lokal). *Oleh: Rodiyah, UNNES Semarang*

Redesain Pendidikan Kejuruan di Indonesia sebagai suatu Wacana Ke Depan. *Oleh: Badraningsih Lestari, FT UNY*

Redesain Sistem Pendidikan Kewirausahaan Di Sekolah Menengah Kejuruan: Alternatif Pengentasan Pengangguran Di Indonesia. *Oleh: Nuryadin Eko Raharjo, FT UNY*

Rekonstruksi Pendidikan dan Penguatan Modal Sosial. *Oleh: Siti Irene Astuti D, FIP UNY*

Isu-Isu Strategis Desentralisasi Pendidikan Kejuruan Indonesia. *Oleh: Dr. Putu Sudira, M.P. FT UNY*

II

Redesain Sistem Pendidikan dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. *Oleh: Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd, Rektor UPI Bandung*

Redesain Sistem Pendidikan dan Manajemen Pendidik dan Tenaga

Kependidikan. *Oleh: Prof. Dr. Muchlas Samani, Rektor UNESA Surabaya*  
Redesain Sistem Pendidikan Guru dan Sistem Manajemen Pendidikan. *Oleh: Prof. Dr. Noeng Muhadjir*

Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor. *Oleh: Dr. Muh Farozin, FIP UNY*

Masa Depan Profesi Guru dalam Bingkai Sentralisasi Pendidikan (Kajian terhadap Praktik Pengembangan Profesi Guru di Daerah Pasca berlakunya UU No. 14 tentang Guru dan Dosen Tahun 2005). *Oleh: Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd, UPI Bandung*

Studi Orientasi Tugas Pengawas dan Kepala Sekolah (Suatu Gagasan Melakukan Revitalisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan Kepengawasan Pendidikan di Era Desentralisasi Pendidikan). *Oleh: Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M. Pd Universitas Negeri Gorontalo*

Kontra-Profesional dalam Pengadaan dan Pemberdayaan Guru. *Oleh: Udik Budi Wibowo, FIP UNY*

Memulihkan Kesemrawutan dalam Praktik Pendidikan di Sekolah. *Oleh: Abdullah Pandang, FIP UNM*

Redesign Pendidikan Calon Guru untuk Mendukung Implementasi Pendidikan Inklusif. *Oleh: Pujaningsih M.Pd, FIP UNY*

Penguatan Fungsi Pengawas Sekolah dalam Kerangka Perbaikan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Oleh: Rahmania Utari, M.Pd, FIP UNY*

Model Hipotetik Jalur Karier Lulusan Program Studi S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan Sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Berbagai Jenis Lembaga Pendidikan. *Oleh: Priadi Surya, M.Pd, FIP UNY*

Redesain Sistem Pendidikan Guru Di LPTK Perguruan Tinggi Muhammadiyah. *Oleh: M. Joko Susilo, M.Pd; Nani Aprilia, M.Pd; dan Nur Hidayah, M.Pd, UAD Yogyakarta*

Peran Guru dan Pendidikan Guru Masa Depan. *Oleh: Bambang Setiyo Hari Purwoko, FT UNY*

Guru Profesional Dan Relevansi Pendidikan. *Oleh: Taty Fauzi dan Mardiana*

Penambahan Program Wajib Kokurikuler Sebagai Redesain Sistem Pendidikan Guru. *Oleh: Hermanto, FIP UNY*

Model Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Melalui Pembelajaran Berbasis Kerja (*Work-Based Learning*). *Oleh: Budi Tri Siswanto, FT UNY*

*Entrepreneurship Hidden Curriculum (EHC): Model Kurikulum Bernuansa Kewirausahaan di Perguruan Tinggi. Oleh: Bayu Dwi Nurwicaksono, UNESA Surabaya*

Redesain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Era Kemanusiaan Universal. *Oleh: Anik Ghufron, FIP UNY*

Kaji Ulang Standar Kompetensi Lulusan dalam Konteks Redesain Sistem Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Oleh: Dr. Mukminan, FIS UNY*

Analisis Pelaksanaan Proses Pendidikan di Indonesia. *Oleh: Makmuri, FMIPA UNJ Jakarta*

Redesain Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar (SK Dan KD) IPA Terpadu SMP/MTs. *Oleh: Ayu Rahayu, Ulfiana Prisdiansari, Elsa Yulianingsih, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta*

Redesain Kurikulum Pendidikan Kejuruan. *Oleh: Prof. Dr. H. Mukhidin, M.Pd. dkk*

Pengembangan Kerangka Evaluasi Implementasi Kurikulum Berbasis Standar Dalam Pendidikan Kejuruan. *Oleh: Dedy Suryadi, M.Pd. dan Drs. Sukadi, M.Pd.,MT. FPTK UPI Bandung*

Analysis Situasi Pendidikan Bahasa Inggris Kejuruan Di SMK. *Oleh: Estu Widodo*

Redesain Sistem Pembelajaran Pada Sekolah Berstandar Internasional. *Oleh: Triwati Rahayu, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*

Evaluasi Integrasi Soft Skills Dalam Kurikulum Pendidikan Kejuruan: Ukuran Hasil Belajar Sebagai Indikator Keberhasilan Pengembangan Profesional. *Oleh: Sri Wening, FT UNY*

Pembangunan Karakter dalam Pembelajaran. *Oleh: Prof. Dr. Belferik Manullang*

Redesain sistem Kurikulum Pembelajaran Bahasa Inggris Calon Guru SD/AUD Berbasis Communicative Competence. *Oleh: Dr. Ali Mustadi, M.Pd. FBS UNY*

Redesain Kurikulum S<sub>1</sub> Pendidikan IPA Menuju Standards For Secondary Science Teacher Preparation. *Oleh: Insih Wilujeng, FMIPA UNY*

Urgensi Integrasi Standar Kompetensi Lulusan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Oleh: Anas Arfandi, FT UNM*

Rekonstruksi Pembelajaran Berbasis Metode Socratic (Strategi untuk Mengoptimalkan Hasil Belajar Siswa dan Meningkatkan Kemampuan Belajar Guru. **Oleh: Nandang Rusmana**

Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pembelajaran Melalui Peran Teknologi Pendidikan Dalam Pembelajaran Berbasis Kompetensi-SCL. **Oleh: Dr. R. Mursid, M.Pd. UNIMED Medan**

Teknik Latihan Keterampilan Dasar Konseling Individual (Studi Eksperimen untuk Menguji Efektivitas Teknik *Microcounseling*, *Interpersonal Process Recall* (IPR) dan *Didactic Experiential* (DE) dalam Melatihkan Keterampilan Dasar Konseling Individual terhadap Mahasiswa Jurusan PPB Angkatan 2007). **Oleh: Anne Hafina A, FIP UPI Bandung**

Redesain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Telaah terhadap Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian). **Oleh: Syukri Fathudin Achmad Widodo, FT UNY**

#### IV

Sistem Pendanaan Pendidikan. **Oleh: Dr. Abbas Gozali, MA**

Sistem Pendanaan Pendidikan. **Oleh: Prof. Dr. Aris Munandar**

Formula Sistem Pendanaan Sekolah yang Berkeadilan. **Oleh: Prof. Muljani A Nurhadi. M.Ed., M.S., P.hD, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta**

Meningkatkan partisipasi Orang Tua dalam pembiayaan pendidikan pada jenjang SMP (Studi di kawasan pedesaan di Kota Semarang). **Oleh: Imam Tadjri. FIP UNNES Semarang.**

#### V

Sarana dan Prasarana Pendidikan. **Oleh: Prof. Dr. Bedjo Sujanto, Rektor UNJ Jakarta**

Sarana dan Prasarana Pendidikan. **Oleh: Dr. Gatot Hary Priowiryanto**

Strategi Penyebaran Konten Pendidikan Berbasis *Digital Video Broadcasting via Satellite* untuk Wilayah Tak terjangkau Internet. **Oleh: Drs. Jaslin Ikhsan, M.App.Sc., Ph.D. FMIPA UNY dan Hafid Setyo Hadi, ST, Manajer IT-Network SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC), Jakarta**

Profil Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bali. **Oleh: Made Agus Dharmadi, S.Pd., M.Pd. FOK Undhiksa Singaraja Bali**

Stadion Maguwoharjo Sebagai Sarana Prasarana Olahraga, Rekreasi, dan Bisnis Di Kabupaten Sleman. *Oleh: Sulistiyono, FIK UNY*

VI

Evaluasi Sistem Pendidikan. *Oleh: Prof. Furqon, M.Pd., M.A., P.hD*

Sistem Penilaian Hasil Belajar ABK dalam Implementasi Pendidikan Setting Inklusi. *Oleh: Sukinah FIP UNY*

Perkembangan Kualitas Pendidikan di Indonesia: Analisis The Global Competitiveness Report. *Oleh: Florentinus Nugroho Hardianto, Harapan Bangsa Business School, Bandung*

Uji Kompetensi Seleksi Guru Berbasis Bidang Studi sebagai Instrumen Danda dalam Pengembangan Profesionalitas Guru. *Oleh: Udi Utomo, UNNES Semarang*

Penilaian Kinerja Guru dan Uji Konsistensi Antar Penilai. *Oleh: Faridl Musyadad, Mahasiswa PPs UNY*

Model Butir Bersama pada Ujian Akhir Daerah untuk Memantau Kualitas Pendidikan di Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi. *Oleh: Dr. Heri Retnawati, FMIPA UNY*

Pengembangan Model Asesmen (Evaluasi) Berorientasi Karir Di Sekolah Menengah Kejuruan. *Oleh: Wahid Munawar, UPI Bandung*

Kedudukan bimbingan dan konseling dalam redesain sistem pendidikan guru. *Oleh : Eka Wahyuni, S. Pd., MAAPD,*

Implementasi kompetensi komputer grafis dan surveying pada tugas jalan raya I Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa jpts. *Oleh : Iskandar Muda Purwaamijaya, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung*

Membumikan ayat-ayat manajemen Menuju kemandirian satuan pendidikan. *Oleh : Nur Aedi, Dr, M.PD*

Pengembangan evaluasi lahan menggunakan autodeskmap untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa jpts fptk upi pada teknik penyehatan. *Oleh : Rina Marina Masri*

## PENAMBAHAN PROGRAM WAJIB KOKURIKULER SEBAGAI REDESAIN SISTEM PENDIDIKAN GURU

Oleh: Hermanto SP

Staff Pengajar Jurs. PLB FIP UNY

### Abstrak

Upaya peningkatan kualitas sistem pendidikan guru di Indonesia terus diupayakan guna mencapai sistem pendidikan guru yang lebih efektif dan efisien namun tetap berkualitas tinggi. Redesain sistem pendidikan tentunya akan berbicara input, proses, output, dan outcomes. Diantara komponen sistem tersebut, proses menjadi bagian menarik untuk dikaji. Proses pendidikan guru adalah komponen kinerja yang relatif lebih mudah dimodifikasi atau diredesain dan dipantau oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Dalam redesain proses pendidikan guru ini, ada beberapa pemikiran untuk perbaikan sistem pendidikan guru. Sebagaimana tuntutan dan isu-isu yang berkembang selama ini seperti tuntutan kompetensi dan program profesi guru (PPG), tidak akan berdampak positif bila proses pendidikannya tidak mendapatkan penyiapan dan pengawalan yang ketat. Agar sistem pendidikan guru semakin baik dan sesuai dengan harapan, maka dalam proses pendidikan harus ada perubahan dan beberapa tambahan. Perubahan dan tambahan tersebut berupa program wajib kokurikuler. Perubahan ini terkait dengan perhitungan dan persyaratan sistem kredit bagi seorang mahasiswa calon guru, sedangkan penambahan terkait dengan program wajib kokurikuler yang ditawarkan dan adanya kewajiban seorang mahasiswa calon guru untuk mengambil program kokurikuler tersebut. Bagaimana sistem kredit dan pengaturannya, serta program wajib kokurikuler apa saja yang ditawarkan agar menjadi salah satu solusi, menjadi bahasan yang menarik untuk dikaji.

*Kata Kunci: program wajib kokurikuler, redesain proses, pendidikan guru*

### Pendahuluan

Pendidik adalah orang yang sangat berperan dalam upaya dan proses peningkatan kualitas pendidikan. Posisi pendidik tentu tidak akan dapat digantikan secara mudah dan total oleh apapun walau sistem dan teknologi sudah begitu maju. Kalau sekedar untuk transfer ilmu, peran guru barangkali dapat digantikan. Namun harus disadari bahwa proses pendidikan bukan hanya transfer ilmu semata. Dalam proses pendidikan harus ada keteladanan, keteladanan itu adalah dari guru atau pendidik. Mengapa demikian, karena keteladanan pendidik adalah contoh perilaku langsung yang bersinggungan dengan peserta didik. Tanpa kehadiran pendidik di kelas atau sekolah, yang dapat ditransfer hanyalah sebatas pengetahuan atau *knowledge* saja. Untuk itu tentu harus disadari bahwa untuk menjadi pendidik

tidaklah mudah, tidak cukup berbekal cerdasnya otak, namun juga adanya keteladanan dalam banyak hal dari yang bersangkutan.

Begitu besar peran pendidik di sekolah, yang tidak saja sekedar mentranfer pengetahuan, namun juga keteladanan dari pendidik. Sekolah tentunya tidak saja menekankan pada kecerdasan otak, namun juga kecerdasan hati secara seimbang. Bila sekolah hanya mengejar dan mengajarkan kecerdasan otak, sangat mungkin kasus-kasus kenekanan siswa karena kegagalan akademik seperti dipaparkan Daniel Goleman dalam bukunya kecerdasan spiritual itu akan dengan mudah ditemui di sekolah. Untuk itu sudah sepantasnya bila sekolah juga harus mengajarkan keseimbangan kecerdasan pada siswa atau peserta didiknya yang meliputi: olah pikir, olah rasa, olah raga dan olah hati seperti yang diharapkan dan dianjurkan oleh diknas. Begitu juga kalau kita mengikuti pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka dalam proses pendidikan harus ditanamkan kemampuan cipta, rasa, dan karsa secara seimbang kepada peserta didik.

Begitu besar peran pendidik dalam proses mencerdaskan anak bangsa dalam kehidupan ini. Pendidik begitu penting kehadirannya termasuk dalam *homeschooling* sekalipun, karena melalui pendidiklah kita bisa membaca dan menulis. Kita tahu bahwa membaca, menulis, dan berhitung adalah modal untuk proses pengembangan pendidikan selanjutnya. Untuk itu tidak heran kalau di Jepang setelah selesainya perang dunia kedua, begitu khawatir dengan guru. Hingga munculah pertanyaan berapa jumlah yang masih hidup. Begitulah pentingnya guru atau pendidik, di Indonesia pun dulu sampai ada slogan, guru pahlawan tanpa tanda jasa, atau akronim guru adalah digugu dan ditiru. Memang begitulah semestinya guru-guru atau pendidik yang diharapkan dapat membawa amanah, keteladanan disamping keluasan ilmu dan kemampuan menularkan atau transfer ilmunya kepada peserta didiknya.

Paparan di atas hanyalah bagian kecil dari cerita tentang peran pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Begitu banyak cerita lain tentang peran pendidik baik di Indonesia ataupun di manca negara dengan berbagai kondisi dan latar belakangnya. Agar dapat menghasilkan pendidik yang berkualitas, tentu harus diawali dengan proses pendidikan guru yang berkualitas pula. Agar sistem pendidikan guru semakin baik dan sesuai dengan harapan, maka dalam proses pendidikan harus ada perubahan dan pembenahan. Perubahan dan pembenahan tersebut tentunya dalam banyak hal seperti sistem rekrutmen dan seleksi calon

mahasiswa, proses pendidikan, proses evaluasi atau penilaian, bahkan proses penempatan. Dengan proses seleksi dan rekrutmen yang baik, tentu dimungkinkan untuk mendapatkan input mahasiswa yang baik dan berkualitas. Dalam proses seleksi harus memperhatikan standar dan yang memenuhi standar yang diterima.

Berbicara proses rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa pendidikan guru, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut antara lain bagaimana dapat mempengaruhi dan menjaring orang-orang yang potensial "cerdas akademik sekaligus memiliki potensi keteladanan" untuk ikut seleksi. Faktor lain adalah prosedur seleksi, teknik seleksi, dan alat ukur seleksi, serta siapa yang menyeleksi. Belum lagi kalau nanti jadi bahwa hasil ujian nasional akan sekaligus menjadi alat seleksi masuk ke perguruan tinggi tentu harus ada formulasi baru. Begitu pula, bila berbicara redesain calon mahasiswa pendidikan guru yang mengikuti program profesi guru tentu akan berbeda pula bentuknya. Dengan demikian begitu sulit dan kompleks berbicara redesain sistem pendidikan guru dari tahap seleksi calon mahasiswa. Untuk redesain sistem seleksi calon mahasiswa pendidikan guru maka diperlukan banyak kerjasama dan perhatian dari banyak pihak.

Redesain sistem pendidikan guru tahap seleksi calon mahasiswa pendidikan guru begitu kompleks, maka implementasinya pun tentu sangat kompleks. Redesain sistem pendidikan guru yang relatif mudah dan dapat segera dilakukan serta tidak banyak bersinggungan dengan pihak lain adalah redesain pada tahap proses pendidikan calon guru. Dengan melakukan modifikasi pada tahap proses pendidikan calon guru, bila dilakukan secara sungguh-sungguh mulai dari perencanaan proses, pelaksanaan proses, dan evaluasi proses maka dimungkinkan hasilnya akan maksimal. Redesain sistem pendidikan guru pada tahap proses adaiah dengan penambahan program wajib kokurikuler bagi mahasiswa calon guru. Mengapa program wajib kokurikuler menjadi salah satu bentuk redesain sistem pendidikan guru, bukankah sebelumnya sudah ada. Apakah bedanya antara kokurikuler yang sudah ada dengan yang ditawarkan dalam redesain sistem pendidikan guru, inilah yang akan dikupas dalam tulisan ini.

### **Sistem Pendidikan Guru di Indonesia Saat ini**

Sistem pendidikan guru tentu selalu berubah dan berkembang mengikuti tuntutan jaman. Seperti sebelum tahun sembilan puluhan misalnya, kita masih mengenal Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang menghasilkan calon guru sekolah

taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Untuk menghasilkan calon guru di sekolah menengah maka dikelola oleh perguruan tinggi khususnya IKIP atau FKIP. Namun sekarang ini lembaga pendidikan yang menghasilkan calon tenaga kependidikan semuanya dilakukan di perguruan tinggi. Dengan demikian sekarang tidak dikenal lagi adanya SPG, SGO, ataupun SGPLB. Bahkan dengan dikeluarkannya undang-undang guru dan dosen, untuk menjadi guru sekarang ini serendah-rendahnya harus berpendidikan sarjana (S1 atau D4). Semua ini tentunya demi memperbaiki dan membenahi profesi guru.

Membenahi profesi guru bukanlah pekerjaan mudah. Meningkatkan citra guru, meningkatkan mutu guru bukanlah pekerjaan yang sederhana. Pembedahannya bukan hanya meliputi masalah teknis pendidikan, tetapi juga berkenaan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menghargai pendidikan. (Tilaar, 2002) Kalau kita baca dan cermati tulisan Tilaar (2002) dalam paragraf sebelumnya tentang guru dalam bab pedagogik transformatif dalam praksis pendidikan, dalam bukunya perubahan sosial dan pendidikan. Disana telah dipaparkan bahwa gejala menurunnya citra profesi guru bukan hanya di Indonesia, namun juga menjadi gejala internasional. Permasalahan yang dikemukakan adalah manakala dunia cenderung kearah materialistis dan konsumerisme, maka profesi guru yang merupakan suatu kebutuhan dan menjadi komoditas rakyat banyak semakin lama semakin terpuruk. Guru telah menjadi komoditi yang diperlukan tetapi tidak dihargai.

Sistem pendidikan guru di Indonesia saat ini terus berkembang dan berupaya menuju keperbaikan. Selain adanya peningkatan jenjang pendidikan dari tingkat SMA atau diploma menjadi sarjana, akreditasi dan kualitas lembaga pengelola pendidikan guru juga semakin diperketat. Setelah adanya perubahan dari sisi jenjang dan pengelola yang berdampak pada waktu penyelesaian studi untuk seorang calon guru, maka sekarang ini muncul tuntutan baru yaitu pendidikan profesi guru atau PPG. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki guru profesional. Dengan demikian program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S-1 kependidikan dan S-1/D-IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru, agar mereka dapat menjadi guru yang profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik.

Sebagai suatu sistem pendidikan guru di Indonesia saat ini, PPG bertujuan untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan,

melaksanakan, menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Penetapan lembaga penyelenggara PPG pun ditentukan dengan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 126/P/2010. Program PPG memang masih baru bahkan beberapa program studi yang ditunjuk dalam keputusan tersebut masih banyak yang belum melaksanakan atau baru melakukan proses seleksi. Dengan adanya program ini mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas calon pendidik yang benar-benar profesional seperti yang diharapkan dan didambakan masyarakat.

### **Proses Pendidikan Guru yang Minim Praktik**

Pendidik adalah orang yang paling banyak berhubungan dengan anak atau siswa di sekolah. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila pendidik kadang disebut sebagai orang tua kedua setelah bapak ibunya di rumah. Berkaitan dengan tugas pendidik yang utama dan pertama adalah mendidik para peserta didik melalui proses pembelajaran di sekolah. Maka sudah semestinya apabila pendidik berusaha untuk dapat mentransfer ilmu kepada para siswanya dengan sebanyak-banyaknya dan dapat mengarahkan serta membimbing agar para peserta didik menjadi orang yang berbudaya dan mencapai kedewasaan berfikir dan berkarya. Sehingga anak didiknya kelak menjadi orang yang bermanfaat dalam hidup dan kehidupannya kelak. Untuk itu harus disadari oleh guru bahwa profesi guru bukanlah profesi yang sudah jadi. Menurut Tilaar (2002) menjadi guru berarti terus menerus mengubah diri karena pengalaman mendidik bukanlah pengalaman rutin.

Untuk membekali, meningkatkan kemampuan, dan keterampilan seorang calon guru, maka pemberian banyak teori dan praktik tentang belajar dan pembelajaran menjadi sangat penting. Margaret E. Gredler (2001) *learning is important to the individual. It begins in infancy with the baby's acquisition of a few simple skills, such as holding its own bottle and recognizing its mother.* Dengan demikian untuk menjadi guru maka belajar dan belajar adalah menjadi sesuatu yang sangat penting dan diperlukan. Belajar disini tentunya meliputi dua hal, yang pertama belajar tentang teori-teori dan yang kedua adalah belajar praktikmengajar atau mendidik. Tanpa adanya keseimbangan antara kemampuan teori dan kemampuan praktik menjadi guru maka nanti dalam aplikasinya di lapangan akan mengalami banyak

permasalahan dan kendala. Untuk itulah setelah mendapatkan teori, maka mahasiswa calon guru perlu mencermati dan mengkritisi fakta yang ada di sekolah.

Dengan dimilikinya bekal kemampuan menjadi pendidik, mereka akan lebih siap menghadapi tuntutan dinamisasi yang ada di kelas. Walaupun mereka tidak berarti berhenti belajar, namun setidaknya mereka yang sudah punya bekal akan lebih siap dengan tuntutan sekolah dan masyarakat. Untuk itu secara sadar mestinya belajar untuk mendapatkan pengalaman menjadi pendidik perlu terus diupayakan. Untuk itu, harus dikaji ulang dan dicermati kurikulum pendidikan guru selama ini. Berapa banyak praktik-praktik mengajar yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa calon guru, rasanya ini masih sangat kurang. Dari sejumlah 144 SKS yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa calon guru masih begitu minimnya tuntutan untuk praktik mengajar di sekolah. Kalaupun mereka praktik saat praktik pengalaman lapangan (PPL), mereka hanya mengajar tidak lebih dari 16 kali dan itupun peran keteladanannya sebagai pendidik belum nampak.

Permasalahan pendidikan guru yang minim praktik inipun sesungguhnya secara tidak langsung pernah dikemukakan oleh A. Suhaenah Suparno (2002) ketika membahas perubahan IKIP menjadi universitas, bahwa: ..., pendidikan tenaga kependidikan yang diselenggarakan secara konsekutif atau secara *concurrent*, tidak pernah menghasilkan kesimpulan yang jelas. Di Australia, misalnya, kedua sistem tersebut dipraktekkan dan tidak dipermasalahkan. Di Inggris, mahasiswa calon guru ditugaskan ke lapangan dalam semester yang tersebar, misalnya dua minggu pada semester pertama, tiga minggu pada semester kedua, dan seterusnya. ...mereka mempelajari alat, model, dan kasus yang realistis. Namun bagaimana proses pendidikan guru di Indonesia, umumnya tugas-tugas perkuliahan ke lapangan belum dilakukan koordinasi secara baik antar dosen pengampu matakuliah. Mereka terjun ke sekolah setelah semester enam dengan sistem block dan hanya dua bulan.

Untuk mendapatkan dan meningkatkan pengalaman yang cukup, agar kelak dapat menjadi guru profesional tentunya harus cukup praktik dan terjun ke sekolah. Untuk meningkatkan pengalaman calon guru, kita bisa mengadopsi model yang dulu pernah dilakukan di sekolah pendidikan guru (SPG). Dalam model pendidikan di SPG, maka seorang calon guru waktu itu wajib menjadi pembina pramuka di suatu sekolah. Mereka (calon guru) minimal harus menjadi pembina pramuka pada satu sekolah di sore hari setelah pulang sekolah. Namun pada hari yang lain mereka juga harus mengikuti kegiatan kepramukaan di sekolah sendiri (SPG). Dengan demikian

mereka mendapatkan pengalaman langsung dari sekolah praktik dan mendapat bahan baru dari SPG. Model ini bila diterapkan tentunya sangat mudah dan tinggal merumuskan formulasinya bila akan diterapkan dalam model pendidikan guru sekarang ini.

Agar calon guru mendapatkan pengalaman yang cukup, dan tidak minim praktik, maka untuk mengadopsi model di atas harus ada kebijakan lembaga. Mengapa perlu ada kebijakan lembaga, tentu dengan adanya kebijakan maka tugas praktik menjadi suatu kewajiban mahasiswa calon guru. Bila tugas wajib itu menjadi syarat kelulusan dalam suatu matakuliah atau persyaratan untuk mengambil matakuliah disemester selanjutnya, tentu mahasiswa akan melakukan. Namun bila tugas ini tidak wajib dan tidak ada konsekuensinya maka akan menjadi keputusan yang sia-sia. Walaupun secara waktu luang antara mahasiswa calon guru dengan siswa calon guru (SPG) waktu itu lebih banyak mahasiswa calon guru. Berhubung dalam diri manusia itu memiliki rasa malas sebagaimana disinggung oleh Douglas McGregor tentang teori X dan Y. Dalam teori X (negatif), bahwa rata-rata orang tidak menyenangi pekerjaan & sedapat mungkin akan menghindarinya.

#### **Program Wajib Kokurikuler Sebagai Redesain Sistem Pendidikan Guru**

Sistem pendidikan yang berlaku dalam pendidikan tinggi termasuk dalam pendidikan calon guru adalah program sistem kredit semester (SKS). Dalam konsekuensinya bila sistem SKS ini diterapkan sesungguhnya memberikan konsekuensi yang cukup berat bagi mahasiswa. Namun, dalam kenyataannya sistem tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik dan mulus. Banyak sekali mahasiswa calon guru yang memaknai SKS, hanyalah program tatap muka biasa. Walaupun mahasiswa sudah diberikan tugas untuk membaca atau sejenisnya sebagai tugas mandiri atau terstruktur, namun tidak sedikit mahasiswa yang pasif atau melakukan sejadinya. Banyak sekali mahasiswa yang sering tidak siap dengan proses perkuliahan ataupun kadang tidak bisa menyambung dengan materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa kesiapan dan semangat mahasiswa untuk belajar termasuk rendah.

Dalam sistem pendidikan kita, telah mengenal istilah kurikuler, kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2002) kurikuler adalah bersangkutan dengan kurikulum, istilah kokurikuler adalah rangkaian kegiatan kesiswaan yang berlangsung di sekolah, intrakurikuler adalah

kegiatan siswa di sekolah atau mahasiswa di kampus yang sesuai atau sejalan dengan komponen kurikulum, dan ekstrakurikuler adalah berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum, seperti latihan kepemimpinan, dan pembinaan siswa. Dari berbagai istilah tersebut di atas yang telah dipahami, mengapa yang menarik untuk dikaji sebagai redesain sistem pendidikan guru melalui penambahan program wajib kokurikuler. Kokurikuler adalah rangkaian kegiatan kesiswaan yang berlangsung di sekolah dipilih karena dalam teknis pelaksanaan perbaikan sistem pendidikan guru relatif mudah dan tidak terlalu bersinggungan dengan pihak lain.

Untuk melaksanakan rangkaian kegiatan kesiswaan yang berlangsung di sekolah yang disebut kokurikuler, sesungguhnya sangatlah mudah tergantung dari kebijakan lembaga LPTK itu sendiri. LPTK mulai mengatur dan mengelola sebaran kurikulum dan penjadwalan perkuliahan. Memberikan tugas kokurikuler yang baik perlu dipersiapkan terprogram. Sebagai salah satu contoh program kokurikuler yang dikembangkan oleh bagian kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta (2011) meliputi: *success skill* (ESQ *training*, ospek), tutorial pendidikan agama, *creativity training*, *leadership training*, dan *entrepreneurship training*. Namun kegiatan kokurikuler ini dalam aplikasinya, belum menjangkau keseluruhan mahasiswa. Pantauan, tagihan, dan konsekuensi/sanksi bagi yang belum kuat tidak ikuti. Untuk kuatnya program kokurikuler seperti yang dikembangkan ini perlu kerjasama dengan bidang akademik sebagai proses membentuk *student body* mahasiswa.

Uraian di atas adalah contoh program kokurikuler yang dikembangkan bagian kemahasiswaan untuk membentuk *student body* mahasiswa pada umumnya. Bagaimana program kokurikuler yang dapat dikembangkan bagi mahasiswa calon guru. Untuk mengembangkan program wajib kurikuler bagi mahasiswa calon guru tentunya harus dirumuskan secara bersama-sama oleh lembaga, apa tujuan dan tuntutan yang akan dibentuk, dan persyaratan apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang calon pendidik. Dari situlah program kokurikuler tersebut dirumuskan dan dikembangkan. Langkah merumuskan program kokurikuler seharusnya dilakukan bersamaan pada saat penyusunan kurikulum yang akan ditempuh mahasiswa calon guru tersebut. Dengan demikian akan terprogram dalam kurikulum, kompetensinya, syarat minimal, waktu, cara pencapaian (kurikuler, dan pengembangan kokurikuler) bagi mahasiswa calon guru.

### **Pengelolaan Wajib Kokurikuler Sebagai Redesain Sistem Pendidikan Guru**

Pemilihan dan pengelolaan program wajib kokurikuler sebagai redesain sistem pendidikan guru perlu diformulasikan secara jelas dan tepat, sehingga benar-benar dapat mencapai dan mendukung pengembangan pengalaman mahasiswa calon guru. Walaupun program kokurikuler tersebut tujuannya baik, namun bila tidak dikelola dengan baik maka hasilnya belum tentu baik. Program wajib kokurikuler dapat diakui sebagai SKS kegiatan kokurikuler yang terpisah dari SKS akademik atau menjadi bagian yang dipersyaratkan dari SKS akademik dengan bobot nol (0) SKS. Semua itu tergantung ketentuan lembaga yang telah disepakati. Dengan adanya pembobotan dan kejelasan SKS, maka mahasiswa akan mengambil pilihan wajib kokurikuler yang ditawarkan. Begitu pula untuk memantau pelaksanaan program kokurikuler bagi mahasiswa, diperlukan lembar monitoring baik secara manual atau melalui program yang telah disiapkan dalam jaringan komputer.

Untuk melaksanakan program wajib kokurikuler bagi seorang mahasiswa calon guru, waktunya tentu dapat diatur sendiri namun dalam satu semester yang berjalan. Dengan demikian setiap satu semester akan ada laporan dan rekap pelaksanaan program wajib kokurikuler oleh mahasiswa. Adapun untuk program wajib kokurikuler sebagai redesain sistem pendidikan guru, tentunya dipilih yang sesuai tuntutan kompetensi dan kebutuhan calon guru. Beberapa program wajib yang kokurikuler yang dapat ditawarkan kepada mahasiswa calon guru misalnya: berkaitan dengan karya tulis dan jurnalistik, penelitian, asesmen peserta didik, latihan mengajar, kepemimpinan, kreativitas, atau yang lebih spesifik berdekatan dengan keahlian khusus di program studinya, dan sebagainya. Berbagai program yang ditawarkan tersebut perlu dibuatkan rambu-rambu secara jelas sehingga mahasiswa dapat memilih dan melakukan secara tepat pula.

Menjadi guru sesungguhnya bukanlah hal yang mudah karena mereka harus siap secara keilmuan menyampaikan kepada peserta didik dan secara keteladanan, harus sadar bila dirinya menjadi contoh bagi orang lain. Teladan dalam hal kejujuran keilmuan, kewibawaan yang tidak menakutkan, tegaknya kedalaman dan keluasan keilmuan yang dimiliki, termasuk keteladanan dalam penampilan. Untuk itu dalam program wajib kokurikuler bagi seorang mahasiswa calon guru, berbagai tawaran kokurikuler tersebut di atas perlu dilakukan dan ditumbuhkembangkan. Salah satu kokurikuler yang penting untuk diberikan penekanan dalam tulisan ini adalah kemampuan calon guru dalam melakukan asesmen peserta didik. Kemampuan ini

dipandang penting karena kemampuan ini selama ini belum banyak dikembangkan. Asesmen sangat penting dilakukan guru, agar dapat memberikan program layanan yang tepat kepada peserta didik.

### **Asesmen Sebagai Kokurikuler Wajib untuk Menyiapkan Pendidikan Inklusi**

Asesmen adalah proses penilaian suatu keadaan yang meliputi asesmen fungsional, klinis, dan akademik. Menurut Ronald L. Taylor, (1984) asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi/data tentang penampilan individu yang relevan untuk pembuatan keputusan. Begitu pula pengertian asesmen menurut R.J. Dietel, J.L. Herman, and R.A. Knuth NCREL, Oak Brook, (1991):

*assessment may be defined as "any method used to better understand the current knowledge that a student possesses." This implies that assessment can be as simple as a teacher's subjective judgment based on a single observation of student performance, or as complex as a five-hour standardized test. The idea of current knowledge implies that what a student knows is always changing and that we can make judgments about student achievement through comparisons over a period of time. Assessment may affect decisions about grades, advancement, placement, instructional needs, and curriculum.*

Asesmen sebagai proses pengumpulan informasi dan data yang terkait dengan calon peserta didik. Melalui kegiatan asesmen yang tepat, program penanganan dan layanan kepada peserta didik akan lebih baik. Melalui program asesmen inilah, guru dapat mengetahui dan mengembangkan potensi setiap peserta didiknya secara tepat pula. Kemampuan asesmen tersebut dapat ditekankan sebagai salah satu kokurikuler wajib yang harus dilakukan oleh mahasiswa calon guru. Lalu apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa calon guru dalam kegiatan tersebut, paling tidak adalah pemahaman tentang asesmen dan memahami instrumen baku bila ada, menyusun instrumen nonbaku bila belum ada yang baku, melakukan pemaparan atau desiminasi kepada teman atau adik tingkat, dan yang terakhir adalah praktik melakukan asesmen dan membuat laporannya.

Dengan adanya tugas atau kegiatan asesmen yang terus menerus dan berulang tentang kemampuan ini, maka seorang mahasiswa calon guru akan memiliki keterampilan yang diperlukan bila kelak menjadi guru seperti dalam tuntutan kompetensi. Namun demikian agar mahasiswa tidak jenuh dan merasa bosan dengan tugas tersebut, maka kegiatan ini dapat dibuat secara berkelompok dan individu. Melalui kemampuan kokurikuler melakukan asesmen, mahasiswa akan

tertuntun dan mulai terbiasa dengan tugas-tugas pokok seorang guru, sebagaimana profesi dokter mengenalkan mahasiswa kedokteran tentang kegiatan di rumah sakit dan melakukan tindakan. Tentu saja kegiatan asesmen ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat semester dan dikaitkan dengan salah satu matakuliah yang ditempuh.

Apabila mahasiswa calon guru telah terbiasa dengan kegiatan asesmen sebelum menyusun program pembelajaran, maka mereka kelak semakin mudah mengenali potensi calon siswanya. Dengan memahami potensi dan kepekaan siswa inilah, maka guru akan lebih mudah mengarahkan potensi siswa menjadi prestasi. Guru yang terbiasa melakukan asesmen akan memiliki pemahaman tentang kemampuan peserta didik dan sebarannya. Dengan demikian guru akan mengetahui ada tidaknya siswa yang memerlukan pendidikan khusus atau inklusi. Sebagaimana diketahui, pendidikan inklusi dilaksanakan karena adanya siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum. Apabila guru-guru telah memahami potensi siswa dan ternyata di kelasnya ditemukan siswa yang memerlukan layanan khusus, maka pendidikan inklusif di kelas itu akan jauh berhasil dibandingkan bila siswa tersebut diserahkan kepada guru pembimbing khusus.

Berbicara tentang pendidikan inklusi, sesungguhnya bukan hal yang baru. Merealisasikan pendidikan inklusi memerlukan kosekuensi yang tidak ringan, maka banyak pihak yang tidak mau peduli atau seakan-akan tidak tahu. Padahal sering didapati di sekolah atau di kelas reguler ditemukan adanya siswa berkebutuhan khusus karena kecerdasannya tinggi, gangguan emosi perilaku, dan kelainan yang disebabkan faktor lainnya. Sebagaimana dikemukakan Jack L. Nelson, dkk. dalam *Critical Issues in Education Dialog and Dialectics* (2004) terkait dengan *inclusion and mainstreaming: special or common education. ...Full inclusion of all children into school life is a fundamental principle in a free, democratic society. Full inclusion means that students classified "special" or "exceptional" because of individual physical or mental characteristics would not be isolated into separate schools, separate classes, or pull-out sessions.*

Konsep inklusi seperti di atas tentu akan terus berkembang seiring dengan kesadaran manusia dan hasil analisis aplikasinya di sekolah. Di lapangan ada sekolah yang melaksanakan program inklusi penuh, sebagian atau moderat. Terlepas program inklusi mana yang diterapkan, namun yang penting adalah timbulnya kesadaran dari semua warga sekolah terutama guru dan kepala sekolah.

Mengapa pihak siswa dan orang tua sebagai bagian dari sekolah tidak terlalu perlu dirisaukan. Bila semua sekolah telah menerima keberadaan siswa berkebutuhan khusus dan memberikan layanan yang terbaik, maka tidak ada pilihan bagi orangtua siswa yang "normal" untuk menyekolahkan putra putrinya. Untuk itu melalui redesain sistem pendidikan guru, perlu adanya penambahan program wajib kokurikuler asesmen dan lainnya guna mendukung kemampuan kompetensi profesi calon guru di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Redesain sistem pendidikan guru adalah salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan guru itu sendiri. Dampak positif dari redesain sistem pendidikan guru, akan menguntungkan banyak pihak khususnya calon guru. Namun demikian redesain sistem pendidikan guru yang baik akan berimbas pada kualitas pendidikan pada umumnya. Redesain sistem pendidikan guru dalam proses pendidikan guru dapat dilakukan dengan cara penambahan program wajib kokurikuler bagi calon guru. Dengan adanya penambahan program kokurikuler yang terprogram tentu akan mendukung kemampuan seorang calon guru. Program kurikuler sebagai program wajib bagi seorang mahasiswa harus diformulasikan sejalan dengan penyusunan kurikulum, sehingga program wajib kokurikuler ini lebih tertata dan akan diakui sebagai SKS kokurikuler yang berbobot nol atau tidak.

Program wajib kokurikuler yang disiapkan dengan baik akan memberikan bekal keterampilan bagi calon guru. Salah satu program wajib kokurikuler yang perlu diberikan kepada mahasiswa calon guru adalah program asesmen. Program asesmen akan membekali calon guru mengenali dan memahami kondisi siswa. Dengan memahami kemampuan calon siswa maka guru akan dapat memberikan layanan secara purna kepada siswa. Dengan melakukan asesmen guru akan tahu perlu tidaknya memberikan layanan khusus kepada siswa. Memberikan layanan khusus kepada siswa yang memiliki kemampuan berbeda, walaupun guru tidak menyebut demikian namun guru telah melaksanakan pendidikan inklusi. Pelaksanaan pendidikan inklusi yang demikian akan lebih bagus, karena semua guru memberikan layanan yang terbaik dan sesuai dengan kondisi siswa. Itulah salah satu manfaat bila asesmen ditegakan dan mulai dibiasakan kepada para mahasiswa calon guru melalui program kokurikuler.

### Daftar Pustaka

- A. Suhaenah Suparno, dkk. 2002. *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru* (dalam Bunga Rampai H.A.R. Tilaar). Jakarta: Grasindo.
- Baker, E. L. 1991. *Alternative Assessment and National Education Policy*. Paper presented at the symposium on Limited English Proficient Students, Washington, D.C.
- Cecil R. Reynolds, Ronald B. Livingston, Victor Willson. 2010. *Measurement and Assessment in Education 2nd*. New Jersey: Pearson International Edition.
- H.A.R. Tilaar. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Jack L. Nelson. Stuart B. Palonsky, Mary Rose McCarthy. 2004. *Critical Issues In Education Dialogues and Dialectics*. New York: McGraw Hill.
- Margaret E. Gredler. 2001. *Learning and Instructional: Theory into Practice*. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- M. David Miller, Robert L. Linn, Norman E. Gronlund. 2009. *Measurement and Assessment in Teaching*. New Jersey: Pearson International Edition.
- Robert Drummond, Karyn D. Jones. 2010. *Assessment Procedures for Counselors and Helping Professionals*. New Jersey: Pearson International Edition.